

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025							
No		INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka		Ditutup	
SELURUH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA							
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Data pribadi PNS, meliputi : 1. Daftar riwayat hidup 2. Data kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak kekayaan pribadi yang menurut aturan tidak wajib dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia		Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan

2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dokumen pengelolaan kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. Kenaikan Gaji Berkala 3. Mutasi 4. Pensiun 5. Administrasi kepegawaian		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia		Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia		Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Data rencana penempatan ASN dalam jabatan struktural		Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan		Menjaga iklim kondusif di lingkungan pekerjaan	Sampai dengan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan
5	Kasubag Umum dan Kepegawaian	informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya		Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana		Menjaga keamanan informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana Menjaga kelancaran proses penegakan hukum	30 tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau setelah putusan pengadilan/inkrah

6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dokumen hasil sidang Baperjakat		Menghambat proses penyusunan pengambilan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur		Mengamankan proses pengambilan kebijakan	selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan kebijakan
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Momerandum dan disposisi pimpinan		Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan		Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Nota Dinas		Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan		Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya		Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan		Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
10	Kasubag Keuangan	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)		Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya		Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Setelah LHP disetujui oleh DPRD dalam Sidang Paripurna

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara*

				penyimpangan keuangan negara			
1	Kasubag 1 Keuangan	Rincian Harga Penawaran dari Penyedia Barang dan Jasa		Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.		Membangun persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa
1	Kasubag 2 Keuangan	Laporan keuangan yang belum diaudit		Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara		Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	sampai keluar hasil audit

Selanjutnya diisi oleh dokumen dan informasi spesifik setiap bidang di Perangkat masing-masing dengan format kolom yang sama.

CAMAT DARANGDAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara